



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPERLITBANG
KABUPATEN KARANGANYAR

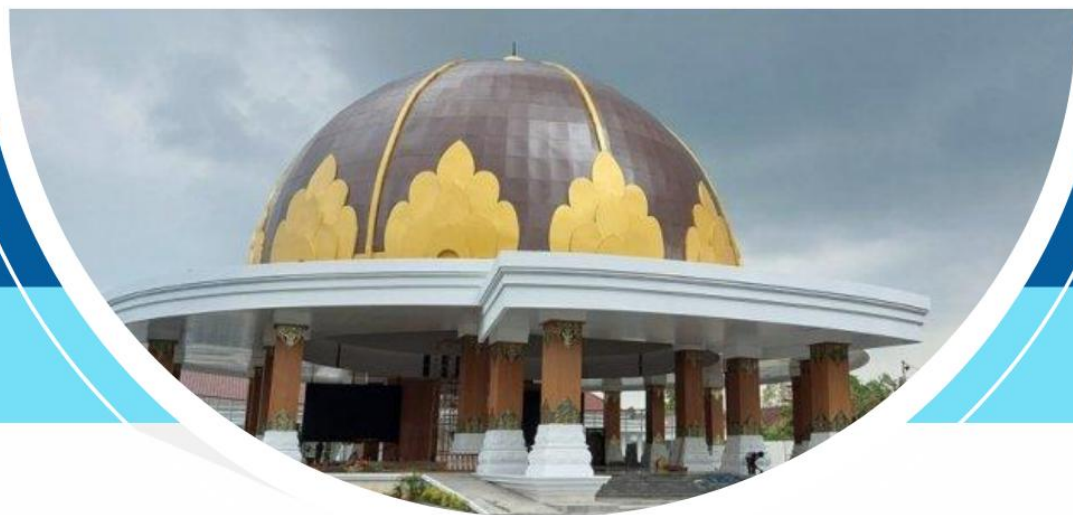
#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Karanganyar
Life-Center Of Nusantara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 dapat disusun dengan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Baperlitbang merupakan laporan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

BAPERLITBANG sebagai Koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, terutama Perangkat Daerah, agar dapat mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, realistis konsisten dan sinkron dengan pusat dan provinsi.

BAPERLITBANG sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama 1 tahun ini, sesuai dengan rencana dan anggaran. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis organisasi Baperlitbang. Hasil pelaksanaan diukur dengan indikator-indikator tertentu yang kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui kinerja organisasi.

Kami mengucapkan semua pihak yang telah mendukung dan kerjsama selama 1 tahun ini sehingga Baperlitbang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

Karanganyar, 26 Februari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. GAMBARAN UMUM.....	I-2
C. DASAR HUKUM	I-5
D. MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI	I-7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	II-1
B. PERENCANAAN KINERJA	II-4
C. PERJANJIAN KINERJA	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. REALISASI ANGGARAN	III-9
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN	IV-1
B. SARAN	IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar ASN PNS per Desember 2024	I-5
Tabel 1.2	Daftar ASN Non PNS per Desember 2024	I-5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024.....	II-3
Tabel 2.3	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024.....	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pegawai Baperlitbang Tahun 2024	II-8
Tabel 3.1	Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	III-1
Tabel 3.2	Kinerja Program Tahun 2024	III-2
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-3
Tabel 3.4	Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023.....	III-3
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Program Tahun 2023 dan 2024	III-4
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (akhir RPD).....	III-5
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (akhir RPD).....	III-6
Tabel 3.8	Rincian Capaian Kinerja. Penyerapan dan Efisiensi Anggaran	III-8
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Baperlitbang	I-4
------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2024-2026, pembangunan di Kabupaten Karanganyar berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan 6 tujuan strategis daerah salah satunya adalah **Meningkatkan Daya Saing Daerah** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi**.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, sinkron dengan pusat dan provinsi, realistik dan dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengatasi permasalahan / isu strategis daerah. Perencanaan dan penganggaran menjadi fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan. dan urusan Penelitian dan Pengembangan. BAPERLITBANG merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAPERLITBANG menentukan tujuan strategis Perangkat Daerah adalah Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan 3 sasaran strategis OPD :

1. Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran,
3. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Di era Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat diperlukan, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum

B.1. Tugas dan Fungsi

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang

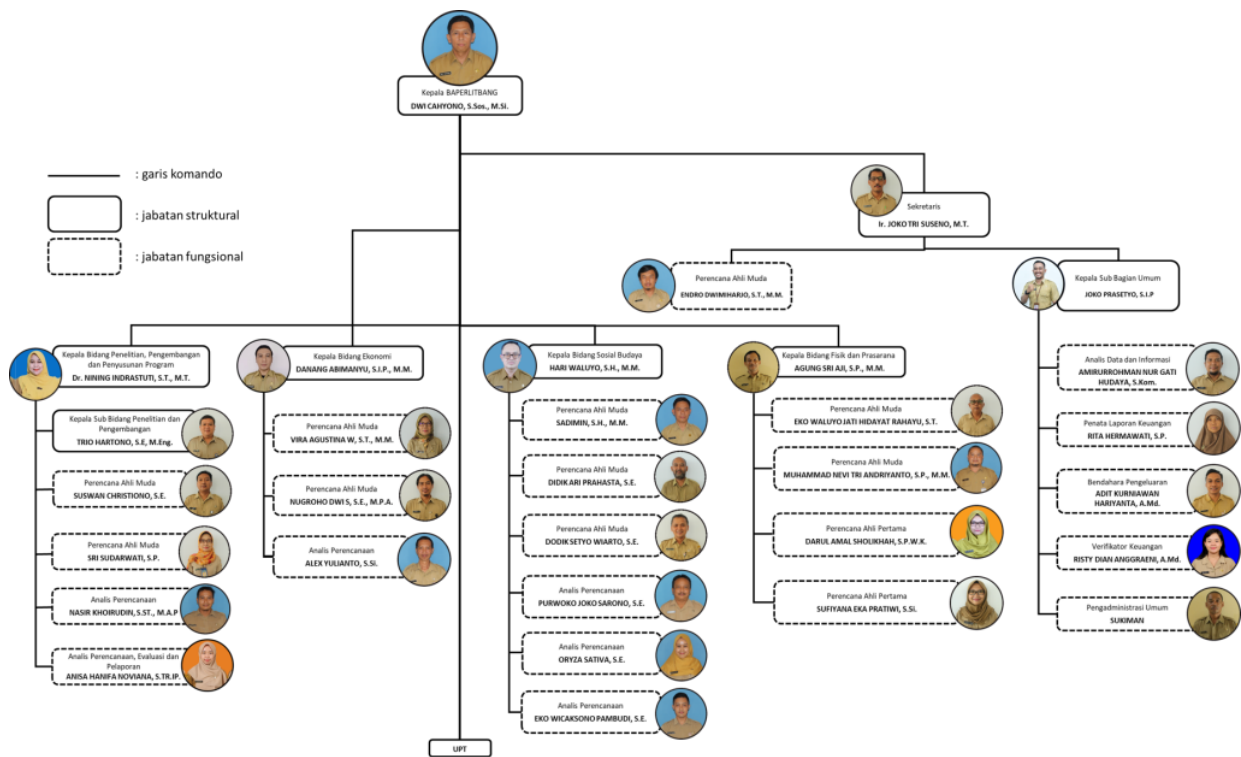
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda
5. Kepala Bidang Ekonomi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda



Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPERLITBANG

B.3. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baperlitbang di Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pegawai yang terdiri dari PNS dan Non PNS, Jumlah Pegawai sebanyak 44 orang terdiri dari 31 PNS dan 13 orang Non PNS sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Daftar ASN PNS per Desember 2024

NO	NAMA	NIP	STATUS	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	19730614 199303 1 002	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	19671121 199803 1 010	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
3.	DANANG ABIMANYU, S.I.P., M.M..	19880406 200701 1 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
4.	AGUNG SRI AJI, S.P., M.M.	19731231 199903 1 022	PNS	Pembina (IV/a)
5.	Dr. NINING INDRIASTUTI, S.T., M.T.	19761026 200604 2 022	PNS	Pembina (IV/a)
6.	HARI WALUYO,S.H., M.M.	19701009 199803 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
7.	JOKO PRASETYO, S.I.P.	19880424 201101 1 009	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
8.	EKO WALUYO JATI HIDAYAT RAHAYU, S.T.	19700923 199803 1 007	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
9.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	19781106 200501 1 005	PNS	Pembina (IV/a)
10.	MUHAMMAD NEVI TRI ANDRIYANTO, SP. MM.	19800413 200501 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
11.	SRI SUDARWATI, S.P.	19820602 200604 2 016	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
12.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	19781030 200902 1 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
13.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	19840923 200902 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)

NO	NAMA	NIP	STATUS	PANGKAT/ GOLONGAN
14.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	19710830 200501 2 006	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
15.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	19840920 200902 1 004	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
16.	DODIK SETYO WIARTO, S.E.	19760202 200902 1 003	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
17.	DIDIK ARI PRAHASTA, S.E.	19810904 201001 1 012	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
18.	RITA HERMAWATI, S.P.	19710416 199603 2 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
19.	AMIRURROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	19850607 201903 1 007	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
20.	SUKIMAN	19790423 200801 1 016	PNS	Pengatur Muda (II/a)
21.	SUFİYANA EKA PRATIWI, S.Si.	19941215 201903 2 022	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
22.	DARUL AMAL SHOLIAH, S.P.W.K.	19960624 201903 2 012	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
23.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	19870618 200912 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
24.	ADIT KURNIAWAN HARIYANTA., A.Md.	19841120 201001 1 018	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
25.	ALEX YULIANTO, S.Si.	19770706 201001 1 012	PNS	Penata (III/c)
26.	PURWOKO JOKO SARONO, S.E.	19700830 200801 1 003	PNS	Penata Muda (III/a)
27.	ORYZA SATIVA, S.E.	19920212 202012 2 007	PNS	Penata Muda (III/a)
28.	EKO WICAKSONO SETYO PAMBUDI., S.E.	19951110 202012 1 006	PNS	Penata Muda (III/a)
29.	RISTY DIAN ANGGRAENI, A.Md.	19941004 202203 2 015	PNS	Pengatur (II/c)
30.	ANISA HANIFA NOVIANA, S.Tr.IP	20001121 202208 2 002	PNS	Penata Muda (III/a)
31.	NAHDLA HENDRAJATI, S.Tr.I.P.	20001230 202308 1 002	PNS	Penata Muda (III/a)

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2024, diolah

Tabel 1.2.
Daftar ASN Non PNS per Desember 2024

NO	NAMA	NID NON PNS	NOMOR SK (KONTRAK)
1.	ABDUL QODIR NUGROHO	NONASN.19810801.0404	050/09 Tahun 2024
2.	ANDRI FUKUH PRASETYO	NONASN.19961105.0425	050/17 Tahun 2024
3.	HAFIDZ WILIKA AMAL, S.E.	NONASN.19921205.0361	050/07 Tahun 2024
4.	HETTY WIJAYANTIE, S.E.	NONASN.19830806.0373	050/16 Tahun 2024
5.	INNA SUCI RACHMAWATI, S.T.	NONASN.19840623.0925	050/06 Tahun 2024
6.	SRI SULARMI, S.P	NONASN.19870919.0400	050/11 Tahun 2024
7.	SUKARNO	NONASN.19790217.1024	050/10 Tahun 2024
8.	SUSANTO PRANOTO	NONASN.19680726.1034	050/12 Tahun 2024
9.	TRI JADI PAMUNGKAS, S.T.	NONASN.19920901.0420	050/08 Tahun 2024
10.	WAGIMAN	NONASN.19820929.0409	050/15 Tahun 2024
11.	MUHAMMAD AFIF MAULANA, S.PD.	NONASN.19940812.0342	050/19 Tahun 2024
12.	YONO WIDODO	NONASN.19820917.0395	050/18 Tahun 2024
13.	DIAN LAILA		050/02.1 Tahun 2024

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2024, diolah

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan ini adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 01 Desember 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17); , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 19);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Baperlitbang adalah :

- 1) menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2024;
- 2) Menyajikan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
- 3) Mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program serta mencari solusi perbaikannya.
- 5) Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya..

Adapun tujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari instansi / unit kerja dalam menjalankan misi dan atau mencapai tujuan organisasi. Diharapkan Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa isu penting yang dihadapi, antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan;
2. Pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang belum optimal secara sistematis dan akurat;
3. Pemanfaatan hasil evaluasi program pembangunan yang masih kurang maksimal dalam mendukung perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Selain menghadapi permasalahan internal tersebut, Baperlitbang juga dihadapkan pada tantangan eksternal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan banyaknya usulan yang tidak diterima, sehingga menimbulkan sikap apatis terhadap mekanisme perencanaan;
2. Pandangan negatif terhadap proses perencanaan pembangunan, khususnya terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana banyak usulan tidak masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP), sehingga menimbulkan anggapan bahwa Musrenbang hanya bersifat formalitas;
3. Dinamika politik saat ini yang menunjukkan semakin dominannya peran Lembaga Legislatif dalam proses penganggaran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Baperlitbang Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang; dan
6. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.1. Rencana Strategis

Memperhatikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat diketahui tujuan strategis daerah adalah **Meningkatkan Daya Saing Daerah** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi**.

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dapat diketahui tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar di tahun 2024-2026.

Tujuan strategis BAPERLITBANG adalah Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi., dengan 3 sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditunjukkan dengan capaian target indikator kinerja utama (IKU) OPD yang telah ditentukan, di setiap tahunnya,

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75	
	Sasaran				
1.1	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74	
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Baik	
1.3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovasi	

Sumber : Renstra Baperlitbang, 2024

Indikator kinerja utama (IKU) OPD inilah yang akan dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja antara Kepala Baperlitbang dengan Bupati, setiap tahunnya. Dalam rangka mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut pada tahun 2024 telah direncanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan rencana alokasi anggaran dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2024. Sedangkan alokasi anggaran yang diterima oleh Baperlitbang pada Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebesar Rp. 8.925.259.083,00

A.2. Rencana Kerja

Sebagaimana telah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, pada tahun 2024 Baperlitbang akan merencanakan 4 Program, 16 Kegiatan dan 45 sub kegiatan, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
1. PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.494.071.583
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	89.632.300
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	2 Dokumen	70.632.300
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	3.500.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	5.500.000
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	4.549.198.223
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.510.989.723
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	32.558.500
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	5.650.000
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	3.050.000
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.050.000
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	238.762.500
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.991.500
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.997.000
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31 orang	225.774.000
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	31 orang	4.000.000
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	229.632.560
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	8.000.000
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	11.315.200
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	22.200.000
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1.700.000
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	2.760.000
18)	Penyediaan Bahan/Material	1 paket	12.590.860
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	18.974.000
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	135.020.000
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	6.572.500
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	10.500.000
6.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	13.275.000
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	13.275.000
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	158.821.000
24)	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	20.301.000
25)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 laporan	89.200.000
26)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	49.320.000
8.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	211.700.000
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	152.030.000
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	29.170.000
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	30.500.000
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100%	1.150.000.000
9.	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	100%	1.025.000.000
30)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1.025.000.000
10.	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	100%	25.000.000
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	25.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	95.987.500
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 laporan	20.000.000
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	75.987.0500
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	93%	1.635.200.000
12.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100%	625.000.000
34)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	141.025.000
35)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	7 dokumen	124.200.000
36)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	142.647.000
37)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	217.128.800
13.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	100%	560.200.000
38)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Laporan	77.500.000
39)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 dokumen	59.500.000
40)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	423.200.000
14.	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	100%	450.000.000
41)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Laporan	205.000.000
42)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 dokumen	40.000.000
43)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	205.000.000
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	52%	650.000.000
		50%	
15.	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	57%	50.000.000
44)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Laporan	50.000.000
16.	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	78%	600.000.000
45)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	57 dokumen	600.000.000
	4 Program, 16 Kegiatan, 45 Subkegiatan,		8.925.259.083

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2024

B. PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program kegiatan dan subkegiatan harus dinyatakan secara jelas kinerjanya dan dapat diukur atau dinilai capaiannya. Berdasarkan pada Renstra dan Renja Baperlitbang tahun 2024, maka kinerja yang akan dicapai adalah Pencapaian indikator kinerja utama OPD yang berupa indikator tujuan dan sasaran OPD yang berupa :

1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) = 72;
2. Nilai SAKIP OPD = 72
3. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah = Baik
4. Indeks Inovasi Daerah = Inovatif

Pencapaian target indikator tersebut diatas akan tergantung pada hasil pelaksanaan program, kegiatan da sub kegiatan dengan indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	72
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 Dokumen
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan</i>	100%
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Baperlitbang selama 1 tahun</i>	100%
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Baperlitbang selama 1 tahun</i>	100%
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 <u>Dokumen</u>
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
18)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	100%
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Layanan Umum selama 1 tahun	100%
24)	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan
25)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 laporan
26)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Baperlitbang	100%
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50 unit
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	100%
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%
30)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen
10.	Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang di analisis untuk perencanaan Pembangunan daerah	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan laporan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan daerah	100%
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	2 Laporan
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian konsistensi dan sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional	93%
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%
34)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan
35)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Laporan
36)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	4 Laporan
37)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%
38)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen
39)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Laporan
40)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
41)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
42)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Laporan
43)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	52%
		Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti (dimanfaatkan)	50%
15.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	57%
44)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	7 Laporan
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	78 %
45)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	57 Dokumen

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2024

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja secara lebih rinci dinyatakan dalam bentuk lampiran Pejanjian Kinerja Pegawai yang ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsung. Secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Pegawai Baperlitbang Tahun 2024

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Kepala Baperlitbang	1) Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai	72	Sasaran
		2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Indeks	Baik	Sasaran
		3) Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks	Inovatif	Sasaran
2	Sekretaris Baperlitbang	4) Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	%	100	Kegiatan
		5) Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	%	100	Kegiatan
		6) Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	%	100	Kegiatan
		7) Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	%	100	Kegiatan
		8) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	%	100	Kegiatan
		9) Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	%	100	Kegiatan

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
		10) Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	Kegiatan
		11) Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	Kegiatan
3	Kabid LitbangPP	12) Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	Kegiatan
		13) Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	Kegiatan
		14) Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 t tahun	%	100	Kegiatan
		15) Persentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola	%	57	Kegiatan
		16) Capaian pengembangan inopvasi dan teknologi yang dihasilkan	%	78	
4	Kabid Sosbud	17) Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	Kegiatan
5	Kabid Ekonomi	18) Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	100	Kegiatan
6	Kabid Fispra	19) Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	Kegiatan
7	Kasubbag Umum	20) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Sub keg
		21) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	Sub keg
		22) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Sub keg
		23) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Sub keg
		24) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	31	Sub keg
		25) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	Sub keg
		26) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	Sub keg
		27) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Sub keg
		28) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	Sub keg
		29) Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	Sub keg
		30) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31	Sub keg
		31) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	31	Sub keg
		32) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		33) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	1	Sub keg
		34) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		35) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		36) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	Sub keg

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
		37) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		38) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	Sub keg
		39) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Sub keg
		40) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Sub keg
		41) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	Sub keg
		42) Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	4	Sub keg
		43) Tersedianya jasa surat menyurat	Laporan	1	Sub keg
		44) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Laporan	1	Sub keg
		45) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	Sub keg
		46) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	Sub keg
		47) Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	50	Sub keg
		48) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Sub keg
9	Kasubbid Litbang	49) Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	Laporan	7	Sub keg
		50) Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Dokumen	57	Sub keg

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Baperlitbang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang pada 2 Urusan atau Bidang yaitu : Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, yang kami laporkan Capaian Kinerjanya.

Pengukuran capaian kinerja adalah mengukur capaian (realisasi) indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dibandingkan target indikator yang terdapat dalam Renja Perubahan OPD Tahun 2024, yang menjadi dasar perjanjian kinerja pegawai Baperlitbang.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

A.1. Kinerja sasaran strategis dan Program (perbandingan target dan realisasi)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72	*)	**)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek	Baik	Baik	100
3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indek	Inovatif	Inovatif	100

Sumber : Baperlitbang Tahun 2024, diolah

Keterangan :

- *) : Realisasi Nilai SAKIP 2024 Baperlitbang belum ada datanya
- **): Prosentasi capaian kinerja belum dapat dihitung karena data capaian realisasi kinerjanya baik.

Tabel 3.2.
Kinerja Program Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	*)	**)
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	%	93	98,97	106,42
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	%	52	57	109,6
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	50	53	106

Sumber : Baperlitbang Tahun 2024, diolah

Keterangan :

- *) : Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Baperlitbang belum ada datanya karena masih dalam tahap reviu oleh Inspektorat
- **): Prosentasi capaian kinerja belum dapat dihitung karena data capaian realisasi kinerjanya belum lengkap.

Tabel 3.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2, dengan mengacu pada tabel 3.3. (dari data yang sudah ada dan dapat diolah) diketahui bahwa kinerja Organisasi Baperlitbang Tahun 2024 adalah : **Sangat Tinggi**

A.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya (2023), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.
Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	90	97,27	108
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	88	91,2	103,6
3.	Meningkatnya hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	50	57	114
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	50	75	150

Sumber LKjIP Baperlitbang Tahun 2023

Dengan membandingkan Tabel 3.1 (kinerja sasaran tahun 2024) dengan Tabel 3.4 (kinerja sasaran tahun 2023) diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan sasaran strategis dan indikatornya sehingga tidak dapat

dibandingkan antara capaian tahun ini (2024) dengan capaian tahun sebelumnya (2023). Perbedaan atau perubahan sasaran antara tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah karena perbedaan dasar penyusunan Renstra Baperlitbang. Tahun 2023 diukur berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023, sedangkan Tahun 2024 berdasarkan RPD Tahun 2024-2026. Namun kalau dilihat hasil kinerjanya maka kinerja sasaran Baperlitbang adalah sama-sama sangat tinggi.

Tabel 3.5.
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	Indikator	Realisasi		Kinerja		Status
			2023	2024	2023	2024	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	70,30	*)	85,3	**)	
		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya					
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	100		108		Sangat tinggi
		Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD		100		100	Sangat tinggi
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	100		108		Sangat tinggi
		Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD		98,97		98,97	Sangat tinggi
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	100		100		Sangat tinggi
		Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah		57		109,6	Sangat tinggi
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan		53		106	Sangat tinggi

Sumber : Baperlitbang, 2024

Keterangan :

- *) : Realisasi Nilai SAKIP 2024 Baperlitbang belum ada datanya
- **): Prosentasi capaian kinerja belum dapat dihitung karena data capaian realisasi kinerjanya baik.

Dari tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan indikator program sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian tahun ini (2024) dengan capaian tahun sebelumnya (2023)

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.5, diketahui bahwa kinerja program oleh Baperlitbang Tahun 2024 jika dibanding tahun 2023 meskipun dengan indikator yang berbeda mempunyai kinerja sangat tinggi.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2024 dengan target akhir dalam Renstra atau RPD Tahun 2026. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas atau tidak di tahun berikutnya. Hasil analisis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2024	2026	
1.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	*)	75	-
2.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	Tercapai
3.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2024

Keterangan :
*) : Realisasi Nilai SAKIP 2024 Baperlitbang belum ada datanya

Berdasarkan hasil pengukuran pada tablel 3.6 diketahui ada 1 indikator sasaran yang belum ada datanya dan 2 yang sudah tercapai, sehingga perlu adanya perubahan (peningkatan) target indikator pada tahun 2025 dan 2026. Indikator Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi sangat baik dan indikator Indeks Inovasi Daerah menjadi sangat inovatif.

Tabel 3.7.
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Program	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2024	2026	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	*)	100	Tercapai
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	Tercapai
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	98,97	95	Tercapai
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	57	56	Tercapai
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	53	52	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2024

Keterangan :
 *) : Belum dapat dihitung karena ada indikator sasaran (Nilai SAKIP OPD) yang belum ada datanya

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.6 dan 3.7, diketahui bahwa kinerja Organisasi Baperlitbang Tahun 2024 adalah sebagian besar sudah tercapai karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nialai pada tahun sebelumnya.

A.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan tersebut meliputi:

- 1) Beban kerja dan indikator kinerja masih belum terdistribusi secara merata; terdapat jabatan dengan beban kerja berlebih, sementara lainnya relatif lebih ringan.
- 2) Belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja pada level subkoordinator.
- 3) Diperlukan pemetaan yang lebih jelas terkait pohon kinerja dan cascading program kegiatan.

- 4) Tugas dan fungsi bidang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam aspek monitoring dan evaluasi.
- 5) Indikator dalam urusan kelitbangan masih memerlukan kejelasan serta formulasi yang lebih terukur agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, beberapa langkah perlu dilakukan:

- 1) Membangun kesepahaman bersama bagi perencana OPD terkait dengan penyusunan indikator, formulasi, serta keterkaitan antarindikator, misalnya melalui diklat, bimbingan teknis, atau workshop.
- 2) Mengadopsi aplikasi perencanaan yang sudah siap pakai, lengkap, terukur, sederhana, serta mudah digunakan agar dokumen perencanaan tetap konsisten dan selaras di tingkat pusat, provinsi, daerah, serta OPD.
- 3) Menyeimbangkan distribusi beban kerja pegawai agar indikator kinerja tidak hanya terkonsentrasi pada satu bidang atau subbidang; misalnya, beban kerja mulai dari perencanaan hingga pelaporan sebaiknya tidak dibebankan pada satu orang saja.
- 4) Meningkatkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal di lingkungan OPD, mengingat kesinambungan dokumen perencanaan hingga pelaporan sangat bergantung pada koordinasi antara bidang, sekretariat, antar-OPD, serta antara pemerintah pusat dan daerah.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Bagian ini membahas analisis sumber daya yang tersedia di Baperlitbang berdasarkan indikator strategis yang telah ditetapkan serta capaian kinerja yang telah dicapai. Dari sisi sarana dan prasarana perkantoran, seperti peralatan, perlengkapan, gedung, kendaraan, telepon, listrik, air, dan internet, kondisinya sudah memadai untuk mendukung kelancaran tugas pegawai.

Jumlah pegawai ASN yang ada saat ini sebanyak 31 orang masih dirasa kurang untuk mengelola keuangan serta menjalankan berbagai aktivitas dan operasional harian, meskipun telah dibantu oleh 14 tenaga Non-ASN. Sebagai perangkat daerah yang memiliki keterlibatan dalam berbagai urusan pemerintahan, koordinasi dengan OPD lain, serta pelaksanaan beragam acara dan kegiatan, ketersediaan SDM baik dari ASN maupun Non-ASN masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar ASN yang harus menangani pengelolaan keuangan, barang, aset, serta tugas tambahan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun OPD lainnya.

Untuk mencapai target kinerja Baperlitbang pada tahun 2024, diperlukan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi utama Baperlitbang, yaitu menjalankan urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan di Kabupaten Karanganyar. Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8.
Rincian Capaian Kinerja, Penyerapan dan Efisiensi Anggaran

No	Program	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100	5.494.071.583	5.277.850.501	96,06%	216.221.082	3,94%
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	1.145.987.500	1.111.416.650	96,98%	34.570.850	3,02%
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	1.635.200.000	1.619.197.520	99,02%	16.002.480	0,98%
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100	650.000.000	600.793.098	92,43%	49.206.902	7,57%

Sumber : Baperlitbang, 2024, diolah

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan capaian kinerja sangat memuaskan yaitu 100% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa indikator program dan kegiatan nilai menunjukkan angka atau nilai absolut, angka yang berdiri sendiri untuk tiap tahunnya, kecuali

indikator nilai SAKIP, capaian tahun sebelumnya akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

Penentuan indikator dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang sering kali tidak berkaitan langsung atau bukan merupakan input bagi indikator di level berikutnya. Hal ini dapat mengakibatkan capaian kinerja seringkali tidak dipengaruhi oleh aktivitas pada level dibawahnya atau aktivitas yang ada tidak sesuai.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini Pada tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar 96,46% atau Rp. 8.609.257.769,00

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.494.071.583	5.277.850.501	96,06%	ST
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.632.300	73.349.900	81,83%	T
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	70.632.300	54.653.900	77,38%	T
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.425.000	97,86%	ST
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.346.000	97,20%	ST
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.925.000	99,25%	ST
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.549.198.223	4.372.772.285	96,12%	ST
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.989.723	4.334.666.285	96,09%	ST
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.558.500	32.556.000	99,99%	ST
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.000	5.550.000	98,23%	ST
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.050.000	2.950.000	96,72%	ST
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.050.000	2.950.000	96,72%	ST
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.762.500	235.771.000	98,75%	ST
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.991.500	2.941.500	98,33%	ST
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.997.000	4.997.000	83,32%	T

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.774.000	224.069.000	99,24%	ST
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.763.500	94,09%	ST
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	229.632.560	214.907.312	93,59%	ST
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	7.981.250	99,77%	ST
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.315.200	11.115.980	98,24%	ST
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	22.200.000	21.966.000	98,95%	ST
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.700.000	1.683.200	99,01%	ST
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100,00%	ST
18)	Penyediaan Bahan/Material	12.590.860	12.573.160	99,86%	ST
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.974.000	18.755.000	98,85%	ST
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135.020.000	121.347.772	89,87%	ST
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.572.500	6.465.000	98,36%	ST
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.500.000	10.259.950	97,71%	ST
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.275.000	12.950.000	97,55%	ST
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.275.000	12.950.000	97,55%	ST
25)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.821.000	154.254.854	97,12%	ST
26)	Penyediaan jasa surat menyurat	20.301.000	20.299.500	99,99%	ST
27)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	89.200.000	84.635.354	94,88%	ST
28)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.320.000	49.320.000	100,00%	ST
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.700.000	210.895.150	99,62%	ST
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.030.000	151.830.150	99,87%	ST
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.170.000	28.965.000	99,30%	ST
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	30.100.000	98,69%	ST
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.145.987.500	1.111.416.650	96,98%	ST
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.025.000.000	996.194.580	97,19%	ST
32)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	1.025.000.000	996.194.580	97,19%	ST
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	21.140.700	84,56%	T
33)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	21.140.700	84,56%	T

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.987.500	94.081.370	98,01%	ST
34)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000	19.969.630	99,85%	ST
35)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.987.500	74.111.740	97,53%	ST
III. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.635.200.000	1.619.197.520	99,02%	ST
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	625.000.000	617.467.610	98,79%	ST
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	141.025.000	138.856.260	98,46%	ST
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	124.200.000	122.762.900	98,84%	ST
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	142.647.000	141.998.100	99,55%	ST
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	217.128.000	213.850.350	98,49%	ST
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	560.200.000	556.507.597	99,34%	ST
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	77.500.000	76.824.090	99,13%	ST
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.500.000	59.338.649	99,73%	ST
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	423.200.000	420.344.858	99,33%	ST
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000.000	445.222.313	98,94%	ST
43)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	205.000.000	203.628.440	99,33%	ST
44)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	38.863.700	97,16%	ST
45)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	205.000.000	202.730.173	98,89%	ST
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	650.000.000	600.793.098	92,43%	ST
15.	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	50.000.000	41.584.900	83,17%	T
46)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	41.584.900	83,17%	T
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	600.000.000	559.208.198	93,20%	ST
47)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	600.000.000	559.208.198	93,20%	ST

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
	2 urusan 4 Program, 16 Kegiatan, 47 Subkegiatan				

Sumber : Baperlitbang, 2024
ST = Sangat tinggi, T = Tinggi,

Berikut daftar subkegiatan yang realisasinya di bawah rata-rata 96,46% tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran dan Sub Kegiatan yang Kinerjanya di Bawah Rata-rata Relisasi Anggaran Baperlitbang

NO	SUB KEGIATAN	Realisasi (%)	Penyebab
1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	77,38%	3
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,09%	2
3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	83,32%	1, 2
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	94,09%	1, 2
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	89,87%	2, 4
6	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	94,88%	2
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,93%	5
8	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	84,56%	1,2
9	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	83,17%	1,2
10	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	93,20%	1,2

Adanya persentase serapan anggaran subkegiatan dibawah serapan anggaran total dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya koordinasi antar pegawai/bidang.
2. Asumsi awal saat perencanaan yang kurang tepat
3. Berkurangnya pegawai (PNS) di Baperlitbang
4. Faktor eksternal diluar Baperlitbang yang tidak bisa diprediksi besarannya (dapat dari OPD lain maupun daerah lain)
5. Nominal SPJ dibawah pagu anggaran karena proses pengadaan barang/jasa

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan tingkat kinerja yang sangat tinggi. Target indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah tercapai. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, baik dari sisi pencapaian indikator maupun realisasi anggaran, telah melebihi 90%, tepatnya 96,46%. Dengan membandingkan persentase penggunaan anggaran dan capaian indikator, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan dengan efisien. Dari segi efektivitas, dengan mempertimbangkan jumlah indikator yang mencapai 69 indikator dan tenaga kerja yang tersedia, pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efektif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki dan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerja serta ketidakmerataan indikator kinerja, di mana terdapat jabatan dengan tugas yang terlalu berat sementara yang lain memiliki beban kerja yang lebih ringan;
2. Belum adanya kejelasan mengenai penanggung jawab indikator kinerja di tingkat subkoordinator atau kepala subbidang;
3. Diperlukan kejelasan mengenai struktur kinerja serta keterkaitan lintas program dan kegiatan;
4. Tugas dan fungsi masing-masing bidang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam aspek monitoring dan evaluasi;
5. Indikator yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan perlu diperjelas serta dirumuskan secara akurat agar dapat diukur dengan baik.

B. SARAN

Sebagai koordinator dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, BAPERLITBANG membutuhkan dukungan serta peran aktif dari seluruh pihak, terutama Perangkat Daerah, guna memastikan perencanaan pembangunan yang berkualitas, realistis, serta selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman bersama di kalangan perencana OPD terkait dengan indikator, formulasi, serta jenjang indikator agar lebih terstruktur. Untuk mendukung hal ini, diperlukan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis, atau lokakarya bagi para perencana;
2. Menggunakan aplikasi yang telah tersedia dan memiliki fitur yang lengkap, akurat, mudah digunakan, serta mampu memastikan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, maupun OPD;
3. Mendistribusikan beban kerja pegawai secara lebih merata guna menghindari ketimpangan, misalnya pada kasus di mana satu orang pegawai harus menangani perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan secara bersamaan;
4. Meningkatkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal di lingkungan OPD, mengingat proses perencanaan hingga pelaporan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar bidang, sekretariat, antar OPD, serta antara pemerintah pusat dan daerah.